

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com

Post

Senin
18 Desember 2023

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Kejari Buton Dipraperadilankan Oleh Kuasa Hukum Tersangka Ahmad Ede Dalam Kasus Dugaan Korupsi Bandar Udara Cargo dan Pariwisata di Busel Karena Dinilai Salah Sita Aset



La Ode Abdul Faris, Kuasa Hukum Tersangka Ahmad Ede

Pewarta: Hengky TA

BUTON, BP - Dinilai salah melakukan penyitaan dalam penanganan dugaan kasus korupsi penyusunan dokumen studi kelayakan pembangunan bandar udara cargo dan pariwisata di Kabupaten Buton Selatan (Busel), Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton digugat praperadilan.

Penyitaan yang dilakukan Kejari Buton terhadap dokumen sertifikat hak milik Ahmad Ede, yang merupakan tersangka dugaan korupsi bandar udara cargo dan pariwisata di Busel.

Dengan adanya hal tersebut, melalui Kuasa Hukum Ahmad Ede, La Ode Abdul Faris, melakukan langkah-langkah hukum, dalam permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo.

"Kami selaku kuasa hukum, melakukan praperadilan, dan sudah diajukan dan diterima PN Pasarwajo pada Senin (11/12/2023) kemarin," ungkapnya, saat melakukan konferensi pers disalah satu Warko di Baubau.

Pihaknya menilai, lanjut Faris, penyitaan yang dilakukan Kejari Buton dinilai tidak sah dan tidak berdasar dan cacat hukum. Hal tersebut,

Lanjutkan ke Hal: 7

Kajari Buton Tepis Salah Sita Aset Dugaan Korupsi Bandar Cargo di Busel, Ledrik Victor Mesak Takaendengan : Tersangka Ahmad Ede Tidak Kooperatif Kembalikan Uang Hasil Korupsi



Kajari Buton Ledrik Victor Mesak Takaendengan

Pewarta: Hengky TA

BUTON BP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton Dinilai salah melakukan

penyitaan dalam penanganan dugaan kasus korupsi penyusunan dokumen

Lanjutkan ke Hal: 7

Ketua Dekranasda Kota Baubau : Produk IKM Baubau Segera Tembus Pasar Nasional



Pewarta: Andina L

BAUBAU, BP-Agenda Kaji Banding IKM Kota Baubau di NTB

kembali mengunjungi sentra produk IKM di Desa Senteluk Lom-

Lanjutkan ke Hal: 7

Pj. Bupati Buton Harap Anggota TRC Buton Jadi yang Cepat, Cermat, dan Cekatan dalam Menghadapi Kebencanaan

Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si berharap Anggota Tim Rekasi cepat (TRC) Buton menjadi

tim yang cepat, cermat, dan cekatan dalam menghadapi kebencanaan.

Bukan hanya itu, Kepala Daerah di Bumi

Lanjutkan ke Hal: 7

Perangi Inflasi, Pemkot Baubau Teken Kerja Sama Dengan Pemkab Bima

Laporan: Ardi

TIM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Baubau melalui komando Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., M.Si selaku Penjabat Wali Kota Baubau, terus melakukan upaya-upaya strategis menekan laju inflasi. Pada bulan November 2023 Inflasi berhasil ditekan hingga pada angka 2,98 % (yoy) dan berhasil keluar dari 10 besar tertinggi di Tingkat Kota di Indonesia dengan menempatkan inflasi Kota Baubau pada posisi ke- 37. Sedangkan pada



2 (dua) bulan di awal kepemimpinan Penjabat Wali Kota Baubau terse-

but Inflasi Kota Baubau sebesar 3,92 % (yoy) dan 3,53 % (yoy), yang men-

empatkan Inflasi Kota Baubau tertinggi kedua dan ketujuh di Indone-

Lanjutkan ke Hal: 7

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Andina Latief, SKM
DIREKTUR



Kejari Buton Dipraperadilan Oleh Kuasa Hukum Tersangka Ahmad Ede Dalam Kasus Dugaan Korupsi Bandar Udara Cargo dan Pariwisata di Busel Karena Dinilai Salah Sita Aset

berdasar objek sita, bahwa dimana dalam surat pemyitaannya menerangkan bahwa, untuk melakukan penyitaan atas dokumen surat barang bergerak maupun tidak yang dipergunakan untuk tindak pidana, yang merupakan hasil tindak pidana yang ada kaitanya, dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja jasa konsultasi, penyusunan kelengkapan studi kelayakan bandara cargo dan pariwisata di Busel, pada tahun anggaran 2020

“Dapat digaris bawahi bahwa, distu tertera angaran 2020, pada kegiatan yg diduga

korupsi, semetara hal yang menjadi objek sita ini diperoleh berdasarkan jual beli, pada tahun 2011. Apa bila dihubungkan, pada kasus dugaan korupsi 2020, itu tidak memiliki kolerasi atau hubungannya, karena terpaut waktu yg sangat lama, dengan jangka waktu 9 tahun,” jelasnya.

Kemudian, hal tersebut tidam berdasar dan sah, karena tidak memiliki hubungan hukum, objek sita dan dugaan korupsi tahun 2020. Hingga, bertentangan dengan pasal 39 undang-undang hukum acara pidana. Dimana, itu juga merupakan improsidural dan bersifat tinden-

sus, karena jelas pada pasal 39, bawah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, yang diperoleh dari tindak pidana

“Ini tidak mempunyai hubungan, atau tidak duduk pada pasal 39. Sebab itu hasil jual beli di tahun 2011, jadi kami menganggap tindakan penyitaan yang dilakukan kejahatan, itu tdk sah dan bersifat tendesius dan melamgar HAM atau hak-hak pribadi pemohon,” tuturnya.

Selain itu, tindakan yang dilakukan Kejari Buton, dalam hal melakukan penyitaan, tidak pernah memberitahukan kepada pemohon, bahwa akan

diadakan pemyitaan, yaitu sertifikat sawa, yg ada di Desa Joho, Kecamatan Mojo Laban, Kabupaten Sukarjo, Provinsi Jawa Tengah. Pemberitahuan tersebut tidak diketahui oleh pemohon Ahmad Ede.

“Yang menjadi keberatan kami yaitu, betentangan eengan pasal 39 ayat 1 undang-undang hukum acara pidana, proses sita tdk berhubungan langsung dengan dugaan korupsi karena perolehan tanah lewat akta jual beli menerangkan 2011, proses sita tidak prosedur karena tidak diketahui oleh pemohon,” tutupnya.(*)

Kajari Buton Tepis Salah Sita Aset Dugaan Korupsi Bandar Cargo di Busel, Ledrik Victor Mesak Takaendengan : Tersangka Ahmad Ede Tidak Kooperatif Kembalikan Uang Hasil Korupsi

men studi kelayakan pembangunan bandar udara cargo dan pariwisata di Kabupaten Buton Selatan (Busel),

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan membatah adanya salah sita aset, dokumen sertifikat hak milik Ahmad Ede, yang merupakan tersangka dugaan korupsi bandar udara cargo dan pariwisata di Busel.

“Kalau salah sita itu aset milik tetangga, atau bukan atas nama tersangka, baru itu bisa dikatakan salah sita versi lawyer,” ungkapny, saat dikonfirmasi, Jumat (15/12/2023)

Lanjutnya, Penyitaan yang dilakukan Kejari Buton, sebab tersangka tidak kooperatif

dalam pengembalian kerugian negara, maka Penyidik akan menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kemudian, penyitaan terhadap aset terpidana adalah, salah satu upaya Penyidik guna mencegah aset dialihkan ke pihak lain, guna mengcover kerugian negara yg dikorupsi pelaku. Sejauh ini pelaku tidak kooperatif mengembalikan hasil korupsi.

Jika nanti terbukti, maka aset akan dikedang guna pemulihan kerugian negara. Apabila ada selisihnya maka akan dikembalikan ke terpidana atau keluarganya.

“Nda ada salah sita. Pemahaman termohon saja yang nanti kita uji di sidang,” tuturnya.

Untuk diketahui, Kuasa Hukum Ahmad Ede, La Ode Abdul Faris, melakukan langka-langka hukum, dalam permohonan prapradilan di Pen-

adilan Negeri (PN) Pasarwajo, yang telah diajukan pada Senin (11/12/2023) kemarin

Pihaknya menilai, penyitaan yang dilakukan Kejari Buton dinilai tidak sah dan tidak berdasar dan cacat hukum. Hal tersebut, berdasarkan objek sita, bahwa dimana dalam surat pemyitaannya menerangkan bahwa, untuk melakukan penyitaan atas dokumen surat barang bergerak maupun tidak yang dipergunakan untuk tindak pidana, yang merupakan hasil tindak pidana yang ada kaitanya, dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja jasa konsultasi, penyusunan kelengkapan studi kelayakan bandara cargo dan pariwisata di Busel, pada tahun anggaran 2020

“Dapat digaris bawahi bahwa, distu tertera angaran 2020, pada kegiatan yg diduga korupsi, semetara hal

yang menjadi objek sita ini diperoleh berdasarkan jual beli, pada tahun 2011. Apa bila dihubungkan, pada kasus dugaan korupsi 2020, itu tidak memiliki kolerasi atau hubungannya, karena terpaut waktu yang sangat lama, dengan jangka waktu 9 tahun,” jelasnya.

Adapun penyitaan yang dilakukan Kejari Buton, yaitu sertifikat sawa, yang ada di Desa Joho, Kecamatan Mojo Laban, Kabupaten Sukarjo, Provinsi Jawa Tengah.

Sementara, yang menjadi keberatan pemohon yaitu, bertentangan dengan pasal 39 ayat 1 undang-undang hukum acara pidana, proses sita tidak berhubungan langsung dengan dugaan korupsi karena perolehan tanah lewat akta jual beli menerangkan 2011, proses sita tidak prosedur karena tidak diketahui oleh pemohon.(*)

kita yang melimpah di Kota Baubau,” tegas Ketua Dekranasda Kota Baubau ini.

Produk unik yang dihasilkan Sasak Maiq selama 10 tahun terakhir, sudah menembus pasar nasional dan sudah dijual di SMESCO Jakarta dan outlet penjualan di Malaysia.(*)

Ketua Dekranasda Kota Baubau : Produk IKM Baubau Segera Tembus Pasar Nasional

bok Barat yaitu Sasak Maiq, IKM yang mengolah hasil laut dan pertanian.

Ketua Dekranasda Kota Baubau, Ibu Reffiani Dwiatmo bersama rombongan disambut antusias Bapak Surjman dan Ibu Suryani yang pengelola usaha Sasak Maiq yang memproduksi

Tortilla Rumpot Laut, Stick Rumpot Laut, Dodol dan Jelly Rumpot Laut, Kripik Ares Gedepong Pisang, Crispy Jantung Pisang dan Krispy Ceker Ayam.

Pada kesempatan kunjungan kali ini, Ibu Reffiani Dwiatmo optimis IKM Kota Baubau sudah

mendapat inspirasi untuk mengembangkan produk makanan dan minuman yang dapat bersaing dan menembus pasar kuliner nasional. “Tentu banyak ilmu dan inovasi yang segera kita kembangkan, agar IKM kita diperhitungkan di tingkat nasional mengingat sumber daya alam

Pj. Bupati Buton Harap Anggota TRC Buton Jadi yang Cepat, Cermat, dan Cekatan dalam Menghadapi Kebencanaan

Penghasil aspal Alam terbesar di dunia itu menegaskan TRC harus mampu membantu seluruh masyarakat terutama warga Kabupaten Buton untuk selamat dan tangguh bersama dalam menghadapi bencana sehingga dapat membantu pemerintah Kabupaten Buton dalam hal pembangunan berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan Pj. Bupati Buton pada Pelatihan Tim Reaksi Cepat dan Sosialisasi Penyelamatan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten Buton yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Aula SMKN 2 Buton, Pasarwajo, Kamis 14 Desember 2023.

Turut hadir dalam

giat tersebut Kapolres Buton, Dandim 1413 Buton yang diwakili Danramil 1413 Pasarwajo, yang mewakili Basarnas Baubau dan para pejabat eselon II Lingkup Pemkab Buton.

“Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang kerap kali terjadi pada musim penghujan,” katan-

ya. TRC merupakan tugas kemanusiaan dalam pencarian, pertolongan dan pengurangan bencana alam dan non alam yang terjadi di Indonesia terkhusus di Kabupaten Buton.

“Untuk itu kepada seluruh peserta pelatihan TRC untuk dapat

senantiasa bersungguh-sungguh dalam meningkatkan mutu dan performa lembaga sehingga semakin kopeten dan memiliki kualifikasi yang mampu melayani dan melayani masyarakat Kabupaten Buton,” katanya.

Pj. Bupati Buton juga berharap agar seluruh masyarakat dapat saling berkolaborasi antar elemen pentahelix guna mendukung upaya pengurangan risiko bencana diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

“Saya juga berharap TRC Kabupaten Buton akan lebih terdapat dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta selalu menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Buton,” pungkasnya.(*)

Perangi Inflasi, Pemkot Baubau Teken Kerja Sama Dengan Pemkab Bima

sia.

Aksi pengendalian inflasi Kota Baubau tidak hanya berhenti pada kegiatan pasar murah, sidak pasar dan pemantauan harga secara real time, namun, pada Rabu (13/12) Penjabat Wali Kota Baubau Dr Muh Rasma Manafi sekaligus Ketua TPID Kota Baubau yang hadir bersama Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Muh Rais, SP, dan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Baubau Syafirin, S.P. melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) Kerjasama Antar Daerah tentang Pengendalian Inflasi Daerah, khususnya di bidang Distribusi dan Pengembangan Komoditas Bawang Merah dengan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP di Ruang Rapat Forkopimda Kantor Bupati Bima.

Dr Muh Rasma Manafi dalam pemaparannya dihadapan Bupati, Wakil Bupati, para pejabat eselon II dan Eselon III OPD terkait mengungkapkan, Kota Baubau merupakan penghubung kepulauan di Sulawesi

Tenggara yang kebutuhan ekonominya digerakkan oleh 6 Kabupaten penyangga. Sehingga Inflasi sangat cepat berdampak bagi kegiatan ekonomi Kota Baubau karena merupakan daerah penyangga beberapa daerah lainnya dalam distribusi pangan dan sandang. “Kerjasama antara Kota Baubau dan Kabupaten Bima dimulai dengan distribusi bawang merah dan akan dilanjutkan dengan kerjasama pada sektor lain,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP yang hadir dengan Wakil Bupati H. Dahlan M. Noer, para Staf Ahli, Asisten, Kadis Pertanian dan Perkebunan, Kadis Ketahanan Pangan dan para Kabag terkait lingkup Sekretariat Daerah menjelaskan, dalam jangka panjang, kerjasama tidak hanya mencakup distribusi bawang merah, tetapi memastikan alih teknologi budidaya komoditi unggulan jika ada potensi lahan yang memiliki karakteristik sama dengan di daerah tujuan.

Lebih lanjut dijelaskan, potensi bawang merah Kabupaten Bima terus

dikembangkan, apalagi dengan adanya satu varietas unggul “keta monca”, sebuah varietas unggul asal Bima yang lebih tahan penyakit dengan produktifitas yang tinggi.

“Mudah-mudahan kehadiran Walikota Baubau akan dapat mewujudkan kerjasama berkelanjutan, bukan hanya pada komoditi bawang, tapi juga potensi di sektor lain seperti peternakan yang memiliki potensi cukup bagus dalam menyokong kebutuhan pangan beberapa daerah,” harapnya.

Pada saat yang sama Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antar kedua Kepala Daerah tersebut langsung ditandatangani dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar OPD Terkait, yakni Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, Muh. Rais M., SP., M.Si dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima, Ir. Muh. Nasir, dan Kamis (14/12/2023), Penjabat Wali Kota Baubau Dr Muh Rasma Manafi, langsung memerintahkan stafnya tersebut melakukan peninjauan lapangan di sentra-sentra komoditas Bawang Merah dan lainnya serta menemui para pelaku usaha terkait.(*)

Bawaslu Dalam Laporan Transaksi Janggal Peserta Pemilu dari PPAK

Laporan: Hasim

JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan kenaikan transaksi janggal peserta Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan saat ini pihaknya tengah mendalami laporan tersebut. Pasalnya, kata dia, data yang diberikan PPATK merupakan data mentah yang perlu diolah sebelum disampaikan kepada publik. "Itu surat dari PPATK sudah disampaikan ke Bawaslu. Saat ini Bawaslu sedang mendalami informasi itu," ujarnya kepada wartawan

sebelumnya usai menghadiri acara Haul Gus Dur ke-14 di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12). Lolly enggan berbiacara lebih jauh soal detail laporan itu. Ia menyebut pendalaman juga sedang dilakukan secara hati-hati lantaran menyangkut isu sensitif. Kendati demikian, ia berjanji Bawaslu akan menyampaikan hasil pendalaman pada pekan depan. "Kami akan menyampaikannya di pekan depan kepada teman-teman, hasil pendalamannya Bawaslu. Jadi sabar, karena ini informasi yang sangat sensitif dan Bawaslu harus berhati-hati dalam melakukan proses pendalaman," pungkasnya. Sebelumnya Ke-

pala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya kenaikan transaksi mencurigakan terkait kampanye peserta Pemilu 2024 hingga 100 persen. PPATK mengatakan telah mengikuti kenaikan transaksi terkait Pemilu ini sejak Januari. Kenaikan transaksi mencurigakan ini tidak hanya terjadi di partai politik, melainkan juga di perseorangan. Lebih lanjut PPATK menjelaskan sudah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai kenaikan transaksi mencurigakan ini. "Semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu. Data sudah ada di mereka," ujar Ivan. (*)

Bawaslu Baubau Apel Siaga dan Kampanye Pemilu Damai 2024



Apel Siaga dihadiri oleh Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si mewakili Pj Wali Kota Baubau,

Pewartanya: Amat Jr

BAUBAU, BP-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Baubau menggelar Apel Siaga Pengawasan Kampanye Damai dan Deklarasi Damai Pemilu 2024 di lapangan lembah hijau Sabtu (16/12/2023)

Apel Siaga dihadiri oleh Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si mewakili Pj Wali Kota Baubau, perwakilan Forkompinda, KPU Baubau, Kepala Badan Kesbang, perwakilan Satpol PP Baubau, Panwaslu Kecamatan se Kota Baubau beserta staf, Pengawas Kelurahan (PKD) se Kota Baubau, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kota Baubau, Partai Politik se Kota Baubau.

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si mengatakan, apel siaga yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Baubau bersama Panwascam se-Kota Baubau menjadi sarana konsolidasi bersama anggota Panwas. Panwascam sebagai pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan yang bersentuhan langsung dengan penyelenggara dan peserta Pemilu kiran-

ya harus bisa bekerja profesional, bersikap netral atau tidak memihak kepada partai politik tertentu, kepada perseorangan peserta Pemilu.

Tentunya komitmen dan integritas ini harus bisa dipegang teguh Panwas sebagai penjaga nilai-nilai dalam pesta demokrasi, termasuk mencegah praktik politik uang, menyampaikan informasi secara berjenjang ke Bawaslu jika menjumpai adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

"Ini semua area sensitive yang harus bapak/ibu amankan dari malpraktik Pemilu seperti pelanggaran kode etik, suap, hingga gratifikasi yang akan mencederai prinsip etik dan profesionalitas pengawas," ujarnya.

Terkait maraknya konten manipulatif atau rekayasa informasi di media sosial, La Ode Darussalam meminta agar diwaspadai. Pesan politik bermuatan hoax, mengadu domba dan membangun sentimen kebencian

diantara warga yang mengancam keberagaman, membahayakan kebhinekaan mulai bermunculan di media sosial, termasuk pesan percakapan seperti whatsapp. Sehingga selain perlu langkah teknis untuk menangkal peredaran konten sesat, penguatan literasi digital masyarakat juga sangat diperlukan terutama untuk meredam dampak polarisasi terlebih dikalangan pemilih pemula.

La Ode Darussalam juga berpesan jika ada ASN ataupun pejabat di lingkungan Kota Baubau yang terlibat berpolitik praktis silahkan dilaporkan ke Bawaslu Kota Baubau, dan Wali Kota Baubau akan menindak sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, ketua Bawaslu Kota Baubau Sarmin, S.Pd dalam apel siaga memandu pembacaan deklarasi yakni pertama, melaksanakan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Tidak melaku-

kan politik uang dan menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemilih. Ketiga, Tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian dan menyebarkan berita hoaks (bohong) dalam berkampanye.

Keempat, Tidak melakukan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba dalam kegiatan kampanye. Kelima, Tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan untuk ikut berkampanye. Keenam, Mendukung Bawaslu Kota Baubau melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap tahapan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pembacaan isi deklarasi kampanye pimpinan dan penghubung partai politik dan jajaran Forkopimda di pandu untuk menandatangani isi Deklarasi Apel siaga Pemilu Damai 2024. Sesuai Penandatanganan, kegiatan di lanjutkan dengan sesi foto bersama. (*)

Seloroh Jokowi Makna di Balik Tetiba Pakai Dasi Kuning



Jokowi pada Sabtu (16/12) memakai dasi kuning, hal yang sangat jarang ia lakukan selama ini. Ia pun buka suara saat ditanya makna hal itu.

Laporan: Hadi

JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbang ke Jepang hari ini, Sabtu (16/12) untuk menghadiri sejumlah agenda, termasuk KTT ASEAN-Jepang. Ia pun sempat gelar konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma. Dalam kesempatan itu, ia menjawab beberapa pertanyaan, dari hal-hal yang bakal dibahas dalam KTT hingga merespons terkait menggunakan dasi kuning.

Berdasarkan video yang diunggah Sekretariat Presiden,

Jokowi kala itu memadukan dasi kuning dengan kemeja putih dan setelah biru tua.

Hal tersebut jarang terlihat sebab Jokowi lebih sering mengenakan dasi merah, biru, atau warna-warna gelap lainnya. Sehingga, momen itu ditanyakan langsung kepada Presiden

"Pak, memakai dasi kuning maknanya apa? Tumben, Pak, pakai dasi kuning," tanya wartawan.

Mendengar pertanyaan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya, tersenyum dan menjawab pertanyaan itu.

"Masa enggak tahu (artinya)?" ujar Jokowi yang langsung meninggalkan tempat konferensi pers setelahnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi tertawa menyaksikan momen tersebut.

Tak lama setelah itu, Mensesneg Pratikno merespons pertanyaan tersebut. Ia mengaku mendapat cerita dari Presiden Joko Widodo yang kesulitan mencari dasi, hingga mengenakan dasi berwarna kuning itu.

"Tadi beliau cerita, kesulitan mencari

dasi, yang ada saja dipakai," kata Pratikno singkat usai mengantarkan Presiden menuju pesawat.

Selama berada di Tokyo, Jepang, Jokowi memiliki tiga acara utama, yakni bertemu Perdana Menteri Fumio Kishida, memimpin KTT ASEAN dan Jepang, serta meng-

hadiri KTT AZEC. Jokowi dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 19 Desember. (*)

Pj Gubernur Sultra ABR Sebut Buton Tengah Penuh dengan Objek Wisata Alam Nan Mempesona

Pewarta: Ardi

BUTENG, Kongkritpost.com-Buton Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Disana terdapat berbagai objek wisata, baik wisata alam, sejarah maupun juga budaya yang menjadi daya tarik tersendiri.

Hal ini diungkapkan Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, bahwa sebut saja mengenai

wisata sejarah yang ada di Buton Tengah terdapat benteng peninggalan kesultanan Buton, seperti Benteng Kota Bombonawulu, Benteng Wasilomata, Benteng Gumanano dan sebagainya.

“Bahwa begitu pula dengan wisata alamnya, kamu akan menemui berbagai pantai berpasir putih, seperti Pantai Mutiara, Pantai Katembe, Pantai Lamena, dan masih banyak lagi pantai lainnya,”

ujarnya, melalui WhatsApp, Jumat (15/12/2023).

Kata dia, keindahan destinasi wisata lain yang perlu juga kita dapat tenggok disana, seperti, Gua Ko, Gua Raba-Raba, Gua Bidadari, Gua Loba-Loba, dan danau Rahia, dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu rasakanlah suasana, sensasi dan keindahannya. di Buton Tengah dan kami tunggu di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara,” harapnya. (*)

Asrun Lio Ikuti Rakor Stabilisasi Harga Cabai Secara Virtual



Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M. Hum., Ph.D mengikuti Rapat Koordinasi Stabilisasi harga cabai menjelang hari raya natal dan tahun baru melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden RI, dilaksanakan di Ruang Setda Kantor Gubernur Sultra, (Kamis, 14 Desember 2023).

Rakor secara virtual yang dihadiri 10 Provinsi di Indonesia yakni Pemprov Kalteng, Pemprov Kaltara, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov Jawa Barat, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Gorontalo, Pemprov Maluku, Pemprov Maluku Utara, Pemprov Sulteng, Pemprov Sultra, yang dipimpin langsung oleh Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Dirjen Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian, Direktur

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Badan Pangan Nasional dan Pejabat terkait.

Turut hadir dari Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Sekda Sultra, Kadis Ketapang, Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan, Sekdis Ketapang, Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Dalam arahnya Edy Priyono mengatakan bahwa ada dua komoditas yang akan ditindaklanjuti dengan segera yakni cabai dan gula pasir.

“Untuk cabai sesuai arahan Menteri Dalam Negeri diminta oleh Bapak Presiden untuk mengkoordinasikan kepada pihak-pihak terkait karna cabai ini sudah berbulan-bulan harganya tinggi terus dan belum adanya tanda-tanda penurunan, terutama di Provinsi yang harga cabainya baik itu cabai merah, cabai rawit dan cabai keriting yang harganya tinggi atau melebihi rata-rata nasional” jelasnya

Pada intinya Pemda

atau Pemprov yang diundang melalui virtual ini, untuk membahas terkait harga cabai di daerah masing-masing dan penyebabnya apa.

Menurut data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Bank Indonesia bahwa harga cabai merah Per 13 Desember 2023 (per kg) yang mengalami kenaikan harga diatas rata-rata Nasional yaitu Kaltara Rp. 116.900, Maluku Utara Rp. 107.500, DKI Jakarta Rp. 105.000, Kalimantan Tengah Rp. 103.150, Jawa Barat Rp. 97.000, Kepulauan Bangka Belitung Rp. 94.400, Gorontalo Rp. 92.500, Maluku Rp. 86.250, Sulteng Rp. 82.500. dan untuk Sulawesi Tenggara harga cabai merah dan cabai merah keriting dibawah rata-rata Nasional yakni 73.400.

Serta harga cabai rawit per-13 Desember 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan diatas harga rata-rata Nasional yaitu Rp. 131.900 bersumber

Dukung Peningkatan Kualifikasi Individu sesuai Kebutuhan Pasar, Sekda Sultra Resmi Membuka Sosialisasi Training of Trainer Vokasi Tiongkok Tahun 2024 di Kendari

18 Desember 2023



Pewarta: Lisna

KENDARI - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio M.Hum. Ph.D secara resmi membuka acara Sosialisasi Pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Vokasi Tiongkok Tahun 2024, bertempat di ruang pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Acara yang dihadiri oleh berbagai pihak ini, bertujuan untuk menanggapi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan dinamika industri masa kini dan mendatang.

Kegiatan ini inisiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi (Kemenko Marves) mengundang partisipasi masyarakat, terutama dari Sulawesi Tenggara, untuk mengikuti pelatihan vokasi di berbagai sektor, seperti pertanian, bioteknologi, big data IoT, dan kuliner, dalam rangka Training of Trainer (ToT).

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., M.Pd., menyapa hadirin dari beragam sektor mulai dari perwakilan

pemerintah daerah 17 kabupaten/kota, delegasi organisasi, lembaga, hingga perusahaan yang beroperasi di Sultra. Asrun menegaskan pentingnya kemitraan antara perusahaan dan perguruan tinggi guna merekrut individu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Kemitraan strategis antara perusahaan dan institusi pendidikan merupakan fokus utama kita. Merekrut individu yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan adalah hal yang kami dorong melalui kemitraan ini,” ungkap Asrun Lio.

Menurut Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Marves, Andi Yulianti Ramli, kerjasama

antara Kemenko Marves dan National Development and Reform Commission (NDRC) Republik Rakyat Tiongkok dalam Training of Trainer Kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pertumbuhan, dan kerjasama dalam pembangunan berkelanjutan.

“Proses pelaksanaan Training of Trainer Vokasi sudah dimulai sejak Juni 2023 di berbagai institusi di Tiongkok dengan partisipasi peserta dari sektor industri. Kami berencana melanjutkan pelatihan ini di Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 dengan serangkaian program yang relevan dengan perkembangan industri,” jelas

Yulianti.

Rencananya, pada tahun 2024, akan diselenggarakan sejumlah pelatihan dalam berbagai bidang, seperti Pharmaceuticals Biotechnology, Renewable Energy System, EV, Rail Technology, Precision Agriculture, Aquaculture, Transportation Management and Technology, Air Freight and Global Supply Chains, Toll Road Management and Technology, AI Big Data and IoT for Tourism, serta Material Processing and Battery Manufacturing.

Pihak penyelenggara berkomitmen untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah, lembaga legislatif, dan jajaran pemerintahan di Sulawesi Tenggara, guna memastikan partisipasi yang lebih luas dan merata dalam pelatihan tersebut. (*)

dari PIHPS, Bank Indonesia.

Dilanjutkan dengan mendengarkan arahan dari tiap-tiap perwakilan Provinsi terkait harga cabai di daerah masing-masing dan penyebabnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

dalam hal ini Sekda Sultra mengatakan bahwa cabai merah keriting memang dibawah rata-rata Nasional, tetapi untuk cabai rawit memang diatas rata-rata nasional atau cukup tinggi, karna keterbatasan ketersediaan yang kurang dan juga saat ini belum

panen.

Serta Pemprov sudah melaksanakan gerakan tanam cabai sebagai langka aksi dan juga menggunakan sekolah-sekolah dari SMA/SMK yang mempunyai lahan untuk menanam cabai. Kemudian secara keseluruhan kita

menanam 2,7 juta bibit yang ditanam.

“Kita mendatangkan sebagian cabai dari Sulawesi Selatan dengan produksi sedikit karena kemarin di Sultra mengalami dampak El-nino dan produksinya kurang dari biasanya” ungkapnya. (*)

Buton Bertekad Entaskan kemiskinan Ekstrim



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Berbicara tentang pemetaan dan strategi pengentasan kemiskinan berbasis kemas, kearifan sosial ekonomi, ini adalah isu yang sangat penting bagi kita semua untuk diperhatikan. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan finansial, tetapi juga tentang ketidakseimbangan sosial dan ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan kita. Hal itu dikatakan Pj. Bupati Buiton melalui Asisten Administrasi tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Buton, Alimani, SSos, MSi ketika berbicara dalam Seminar Penelitian, tentang pemetaan dan strategi pengentasan kemiskinan berbasis kemas, kearifan sosial ekonomi yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Buton di Aula Perpustakaan daerah Kabupaten Buton, Senin, 11 Desember 2023. Saat ini lanjut Asisten I, pemerintah tengah menghadapi 3 isu nasional yaitu pengentasan kemiskinan, prevalensi penurunan stunting dan revitalisasi vokasi. “Berdasarkan

arahan presiden strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem agar dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat nol persen pada tahun 2024,” katanya. Mantan Kadis Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton ini, dalam upaya mengatasi masalah ini, harus melibatkan kearifan lokal dan memahami kondisi serta kebutuhan setiap komunitas. Pemetaan yang baik akan membantu kita mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur. “Namun, hanya dengan pemetaan saja tidak cukup. Kita perlu merancang strategi yang berkelanjutan dan efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan adalah dengan membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Hal ini akan membuka peluang kerja, meningkatkan keterampilan, dan memberikan akses terhadap sumber daya yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” katanya. Mewakili Pj. Bupati Buton, Asisten

I mengajak untuk tetap menjaga dan membangun kearifan sosial ekonomi lokal. Menumbuhkan kewirausahaan dan memanfaatkan potensi lokal adalah langkah penting dalam mengembangkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. “Salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan. Dengan mengasah keterampilan, kita bisa mendorong ekonomi lokal dan memberikan lebih banyak peluang kerja. Selain itu, kita juga harus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan mendukung para pengusaha lokal, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi, jangan ragu buat mendukung dan membeli produk-produk lokal kita,” katanya. Asisten juga mengingatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. “Saya yakin kita semua cinta sama Buton yang indah ini. Kita bisa mengembangkan program yang berkelanjutan, seperti pertanian organik atau pariwisata berkelanjutan, yang tidak cuma mengurangi kemiskinan tapi juga melindungi alam kita,” katanya. (*)

Sekda Buton Pimpin Rapat Analisis Proyeksi Konsultasi Publik II KLHS RPJPD 2025-2045

Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Sekda Kabupaten Buton, Asnawi Jam-

aludin, SPd, MSi memimpin Rapat Analisis Proyeksi Konsultasi Publik

II dalam rangka Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tingkatkan Pengelolaan IKM, Dekranasda Buteng Studi Tiru di Kota Parepare



Ketua Dekranasda Kabupaten Buton Tengah, Asri Yani Yusuf bersama jajaran pengurus diterima langsung oleh Pemerintah Kota Parepare, di wakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare, Eko Wahyu Ariadi

Laporan: Ardi

BUTENG, BP-Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) untuk memperkuat komitmennya dalam mengembangkan sektor industri kecil menengah (IKM) melakukan studi tiru di Kota Parepare.

Ketua Dekranasda Kabupaten Buton Tengah, Asri Yani Yusuf bersama jajaran pengurus diterima langsung oleh Pemerintah Kota Parepare, di wakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare, Eko Wahyu Ariadi serta Pj Ketua TP-PKK Kota Parepare, Andi Heriani Husni, bertempat di ruang pola kantor Walikota Parepere, Kamis, (14/12/2023). Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memperluas wawasan, meningkatkan pengalaman, dan menemukan langkah serta

pola terbaik dalam menyusun program program pendampingan bagi pelaku IKM di Kabupaten Buton Tengah. Dalam kesempatan ini, Ketua Dekranasda Buteng, Asri Yani Yusuf menuturkan, pentingnya kegiatan studi tiru sebagai langkah strategis untuk mengadopsi praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Dekranasda Kota Parepare. “Kami yakin melalui peningkatan wawasan dan pengalaman ini, dapat memperkuat dukungan terhadap pengembangan IKM di Kabupaten Buton Tengah”, tuturnya.

Selain itu kata dia, kehadiran jajaran pengurus Dekranasda Buteng diharapkan dapat memperkuat kerjasama antar lembaga dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam mendukung pengembangan IKM di kedua daerah. “Dengan kehadiran Dekranasda Buton Tengah di kota Parepare diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pelaku IKM dan pemerintah daerah, guna mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lokal”, ungkapnya. Dalam suasana kebersamaan, para peserta studi tiru ak-

tif terlibat dalam diskusi dan pertukaran ide, menciptakan atmosfer yang kondusif untuk pertumbuhan dan inovasi di sektor IKM. Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk membangun jejaring dan kerjasama antara Dekranasda Buton Tengah dengan pihak terkait dalam mendukung pengembangan IKM. Dekranasda Kabupaten Buton Tengah berkomitmen untuk terus memajukan sektor IKM sebagai salah satu pilar ekonomi lokal. Melalui studi tiru diharapkan akan lahir inisiatif dan langkah-langkah strategis yang dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi perkembangan IKM di Kabupaten Buton Tengah. (*)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 bertempat di Aula Kantor Bupati Buton Kompleks Perkantoran Takawa, Jumat, 15 Desember 2023. Di kesempatan itu, Sekda Kabupaten Buton mengatakan, rencana pembangunan di suatu wilayah harus

memegang prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dari seluruh aspek, salah satunya adalah penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dan diintegrasikan dalam penyusunan RPJPD. Jenderal ASN Buton ini lebih lanjut mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini yakni mengidentifikasi serta mengevaluasi

capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dalam integrasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045. “Hari ini konsultasi kedua dan yang hadir pada hari ini adalah ahli semoga bisa memberikan dukungan dan saran untuk perbaikan dokumen kedepan,”

tutur Sekda Buton Sekda berharap melalui Konsultasi Publik II ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan integrasi isu prioritas ke dalam Kebijakan Rencana Program (KRP) dalam kegiatan Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Buton. (*)

Pemkab Buton dan Unsultra Bahas Pengembangan Asbuton



Laporan: Andina L

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton bekerjasama dengan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Kendari dalam pengembangan Aspal Buton sebagai Lapis Permukaan jalan.

Kajian tersebut sekaligus sebagai sosialisasi pedoman pelaksanaan hasil penelitian kajian Aspal Buton sebagai lapis permukaan jalan beraspal Kabupaten Buton di dalam satu Hotel di baubau, Selasa, 12 Desember 2023.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang teknologi Aspal Buton, penggunaannya dalam proyek konstruksi, tantangan yang dihadapi serta inovasi terbaru dalam pengembangan teknologi Aspal Buton sehingga Aspal Buton dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buton, kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton, Wa Ode Stti Raymuna, SE, MSi.

Menurut Kaban Litbang Buton, pelaksanaan sosialisasi tersebut untuk pemanfaatan Aspal Buton sesuai dengan Instruksi Presiden RI, Djoko Widodo terkait dengan penggunaan Aspal Buton untuk jalan nasional maka

atya dasar itu Pemerintah Kabupaten Buton melakukan kerja sama dengan Unsultra terkait sosialisasi pedoman pelaksanaan hasil penelitian Aspal Buton sebagai lapis permukaan jalan beraspal.

Sementara itu pada kesempatan itu, Pj. Bupati Buton yang diwakili Asisten Administrasi tata pemerintahan dan Kesra Sekda Buton, Alimani, SSos, MSI mengatakan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara sejak dahulu tersohor dengan kekayaan alam berupa tambang aspal hingga mancanegara. Sejarah Aspal Buton dikelola pertama kali di era Hindia Belanda oleh perusahaan Buton Ashpalt atau (Butas) milik Belanda sejak tahun 1925. Masuk era kemerdekaan, Asbuton dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dengan nama Perusahaan Buton Aspal Negara (PAN).

Pemanfaatan Asbuton untuk proyek-proyek ruas jalan di Indonesia sudah dilakukan di tahun 1970. Asbuton memasuki puncaknya di era 1980an, sayangnya kejayaan tersebut berangsur suram dan produksi Asbuton mulai menurun setelah Perusahaan Buton Aspal negara mengalami akuisisi oleh PT. Sarana Karya sekitar tahun 1987. Turunnya produksi Asbuton disebabkan kurangnya pemanfaatan Aspal alami yang dipergunakan untuk proyek pembangunan ruas jalan nasional, provinsi,

serta kabupaten/kota. Padahal Asbuton sebagai aspal alami hanya dapat ditemukan di dua wilayah dunia yakni di Indonesia dan Trinidad, Amerika Selatan, kata Asisten I mewakili Pj. Bupati Buton.

Dikatakannya potensi penambahan Aspal Buton sangat besar dan diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan aspal nasional dalam jangka Panjang. Namun demikian sampai saat ini kontribusi pemasokan Aspal Buton untuk memenuhi kebutuhan aspal nasional masih sangat kecil yaitu sekitar 10 persen.

Menyadari akan pentingnya peranan Aspal Buton, maka pemerintah daerah dalam hal ini berharap agar tugas di masing-masing sektor dapat diintegrasikan sehingga dalam upaya pengembangannya industri Aspal Buton dapat meningkat.

Tampil sebagai panelis pada acara sosialisasi itu yakni, Rektor Unsultra, Prof. Dr. Ir. Andi bahrin, MSc.Agric, Dosen dan Peneliti Unsultra, Dr. Ir. H. Hado Hasina, MT, Dr. Irwan Lakawa, ST, MSI, Prof. Ir. H. Yani Taufik, MSI, PHd.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton, Sekdin OPD Lingkup Pemkab Buton, Perwakilan Perusahaan Aspal Buton, Kadin Kabupaten Buton serta Lembaga terkait Aspal Buton. (*)

Pelantikan Ditunda, Sekda : Agar Sekolah Berkesempatan Menyelesaikan Kegiatan DAKnya



Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H Asrun Lio., M.Hum.,Ph.D menjelaskan, dari 16 pejabat yang akan dikembalikan tersebut, empat diantaranya sedang menyelesaikan swakelola DAK, yang akan berakhir tanggal 26 Desember 2023.

Laporan: Mashuri

KENDARI - Melalui beberapa pertimbangan teknis, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya melakukan penundaan pelantikan terhadap sejumlah pejabat yang akan menempati posisi sebagai kepala SMA maupun SMK di lingkup Sultra.

Pelantikan tersebut awalnya dijadwalkan terlaksana pada Hari Jumat (15/12/2023), namun bergeser, yang direncanakan pada Rabu (27/12/2023).

Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H Asrun Lio., M.Hum.,Ph.D menjelaskan, dari 16 pejabat yang akan dikembalikan tersebut, empat diantaranya sedang menyelesaikan swakelola DAK, yang akan berakhir tanggal 26 Desember 2023.

“Kita ketahui bersama, DAK ini bisa berupa fisik maupun non fisik. Jadi Pemprov Sultra memberikan kesempatan kepada para kepala sekolah yang tengah menjabat, untuk menyelesaikan hingga batas akhir yang telah ditentukan, yakni pada 26 Desember 2023. Untuk itu, pelantikan ini ditunda dulu, insya Allah akan digelar kembali pada 27 Desember 2023,” terang jenderal ASN Provinsi Sultra ini.

Mantan Kadikbud Sultra ini menilai, jika keputusan yang diambil tersebut cukup bijak, serta berdasarkan kesepakatan bersama 16 pejabat yang akan dilantik, untuk dilakukan secara bersamaan pada 27 Desember 2023, walaupun sebenarnya pelantikan ini dapat dilakukan, dengan hanya menunda pejabat yang akan memimpin sekolah

yang tengah menyelesaikan kegiatan DAK dimaksud.

“Kesimpulan yang diambil sangat bijak, dalam rangka mengakhiri pekerjaan-pekerjaan dimaksud,” tuturnya.

Asrun Lio mengungkapkan, pelantikan 16 pejabat tersebut akan dilakukan karena adanya putusan PTUN yang memenangkan gugatan para eks kepala sekolah, untuk dikembalikan pada asal sekolahnya sebagai kepala sekolah, dengan alasan bahwa pelantikan yang dilakukan sebelumnya dianggap tidak prosedural oleh PTUN, sehingga mengabulkan seluruh tuntutan eks 16 kepala sekolah yang mengadu ke PTUN.

“Dalam hal ini, kita sebagai pemerintah yang digugat. Adanya putusan pengadilan ini, maka sebagai pemerintah berke-

wajiban melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut. Untuk itu, kami meminta kepada para pejabat yang akan dilantik ini, agar memaklumi adanya penundaan pelantikan karena pertimbangan teknis tadi, sebab pekerjaan DAK pada empat sekolah dimaksud, bukan dikerjakan oleh kontraktor melainkan oleh sekolah, mengingat petunjuk teknisnya demikian dan kepala sekolah bertindak selaku kontraktor,” pesannya.

Untuk diketahui, sebelum dilakukan penundaan tersebut, Sekda Sultra telah melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait, mulai dari Dikbud Sultra, BKD, Inspektorat, Bagian Hukum Pemprov Sultra, termasuk rekan-rekan media. tutupnya. (*)

Harian Pagi
Baubau Post

Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik

Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky TA
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , , mashuri, Jaya, Azis, , Lina

Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra : _

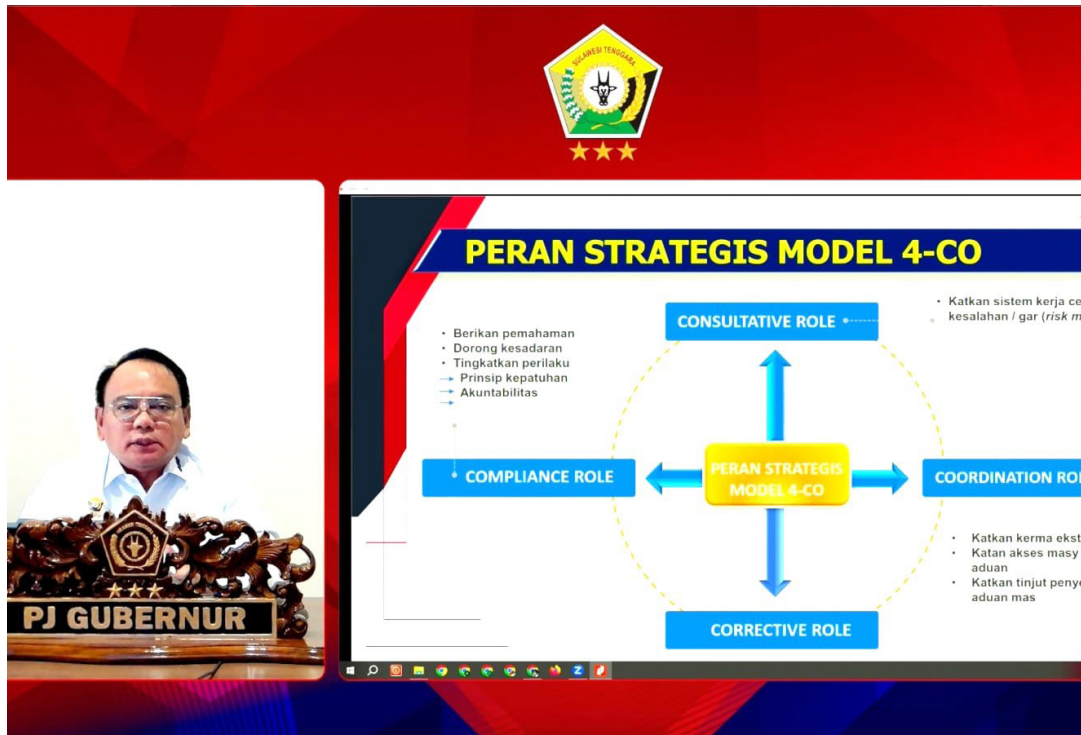
Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Peringati Hakordia 2023, Pj Gubernur ABR : Buka Seminar “Bangun Sultra Tanpa Korupsi”



Pewarta: Alwan

Jakarta - Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, membuka seminar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) tahun 2023 pada Kamis (14/12/23).

“Dengan mengucapkan Bismillah-irrahmanirrahim, pada hari ini Kamis 14 Desember 2023 pukul 08.30 WIB / 09.30 WITA seminar ini secara resmi saya nyatakan dibuka” ucap Pj Gubernur saat membuka kegiatan secara virtual.

Selanjutnya, Andap dalam sambutannya menyampaikan langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan pendekatan model 4-Co.

“Pertama, melalui langkah *compliance role* yakni memberikan pemahaman dan mendorong kesadaran bersama dan juga mengajak peran serta masyarakat bersinergi untuk pencegahan korupsi.

Kedua, *consultative role* untuk meningkatkan sistem kerja dalam mencegah adanya pelanggaran.

Ketiga, *coordi-*

nation role_ yakni dengan meningkatkan kerja sama bersama APH dan instansi terkait dalam upaya penanganan termasuk penyelesaian pengaduan masyarakat. Dan terakhir, apabila seluruh rangkaian sudah tidak berdaya lagi, lakukan langkah-langkah penegakan hukum yakni *corrective role*,” tegas Pj Gubernur.

Andap lalu menyampaikan adagium dari Lord Acton yakni *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.

Ia menjelaskan bahwa korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi akan selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan *pintu masuk* bagi tindakan korupsi,” jelasnya.

Untuk itu, Pj Gubernur selanjutnya mencontohkan bahwa dalam rangka transparansi dan juga akuntabilitas serta langkah percepatan menyikapi laporan atau pengaduan masyarakat, ia merubah sistem pertemuan

dengan masyarakat yang hadir dengan didampingi para Kepala Perangkat Daerah (PD) di lobby kantor Gubernur.

“Setiap Senin setelah apel pagi, saya selalu mengumpulkan para Kepala PD dan masyarakat yang ingin beraudien di lobby kantor Gubernur. Hal ini saya lakukan untuk percepatan penyelesaian keluhan masyarakat (dapat langsung diteruskan kepada para Kepala PD) serta meminimalisir dugaan kepentingan apabila bertemu secara tertutup,” pungkasnya.

Terakhir, Andap juga mengucapkan apresiasi kepada Kajati Sultra, Sdr Patris Yusrian Jaya yang telah menggagas seminar dalam rangka peringatan Hakordia tahun 2023.

“Terima kasih Pak Kajati dan seluruh jajaran yang telah menggagas seminar ini, semoga kita dapat terus bergandengan tangan untuk membangun Indonesia tanpa korupsi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita cintai ini,” tutup Andap. (*)

Pemkab dan Polres Buton Tengah Teken MOU Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang



Kapolres Buton Tengah, AKBP Yana Nurhandiana mengatakan penandatanganan MoU atau nota kesepakatan ini merupakan terobosan penting bagi pelayanan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Laporan: Hengky TA

BUTENG, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Kepolisian Resort Buton Tengah menandatangani nota kesepakatan tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang, di aula kantor Bupati Buton Tengah, Jumat (8/12/2023).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah yang bertujuan sebagai upaya penanganan kasus, pencegahan perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang.

Kapolres Buton Tengah, AKBP Yana Nurhandiana mengatakan penandatanganan MoU atau nota kesepakatan ini merupakan terobosan penting bagi pelayanan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini terjadi di wilayah Buton Tengah.

Sebagaimana kita ketahui bersama peningkatan tingkat pidana yang korban-

nya anak perempuan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sangat tinggi. Dengan penandatanganan MoU hari ini merupakan langkah nyata dalam membangun sistem pelayanan yang lebih baik bagi perempuan dan anak serta korban kekerasan terhadap anak di wilayah Buton Tengah.

Dengan adanya pelayanan terpadu ini kata Kapolres Buteng, proses penanganan kasus perempuan dan anak menjadi lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan korban.

“Kami menyatakan komitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini secara profesional. Kami akan bekerjasama dengan instansi terkait serta mengoptimalkan peran Polwan dan unit kepolisian yang berkomitmen terhadap kasus perempuan dan anak,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Pj Bupati Buton Tengah, Andi

Muhammad Yusuf mengatakan kekerasan pada perempuan dan anak merupakan hal yang harus ditangani secara serius dan memerlukan kerjasama yang baik dari semua pihak, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dan lintas sektor. Untuk itu perlu peran serta dan dukungan semua pihak dalam upaya pencegahannya, sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor dalam meningkatkan pelayanan terpadu terhadap pidana perdagangan orang.

Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf berharap, pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran negara

dalam menjawab tantangan dan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Mari kita bangun komitmen untuk memperkuat jejaring koordinasi antar stakeholder dan lintas sektor, yang merupakan faktor penting dalam proses pencegahan dan penanganan kasus-kasus yang ada. Mari tanamkan nilai-nilai yang berbudi luhur serta kasih sayang, sehingga terhindar dari praktek-praktek kekerasan dalam rumah tangga. Penguatan kelembagaan layanan pencegahan dan penanganan kasus dari semua jajaran juga harus ditetapkan secara konsisten mengefektifkan unit layanan teknis perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA),” tutupnya.

Hadir pada kegiatan ini, jajaran Pemerintah daerah Buton Tengah, Sekda Buton Tengah, Kostantinus Bukide, Asisten, staf ahli, para kepala OPD, Ketua TP PKK Buton Tengah, Asriyani Yusuf, Kasat Reskrim Buton Tengah, para Kabag dan tamu undangan lainnya. (*)

First Lady Kota Baubau Reffiani Dwiatmo Rasman Disambut Hangat di NTB



Pewarta: Andina L

NTB, BP-Kunjungan hari pertama Ibu Reffiani Dwiatmo Rasman, ST di Kota Mataram terus berlanjut, dan di sore hari Kamis (13/12/2023) disambut di Pendopo Gubernur oleh Ibu Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Ir. Lale Prayati, didampingi Ibu Pj Sekda NTB Zuharia Mardiyanti SE beserta jajaran kepala OPD dan pihak Dekranasda NTB.

Dalam penyambutannya, Ibu Gubernur NTB menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kunjungan

gan tim dari Kota Baubau yang dipersilahkan untuk mengunjungi lokasi-lokasi kegiatan IKM NTB untuk sharing guna peningkatan kualitas bersama. "Bisa jadi apa yang tidak ada di kami, mungkin ada di Baubau. Tentu ini adalah peluang untuk berkerjasama," jelasnya.

Tidak hanya berbicara tentang Industri Kecil Menengah (IKM), tetapi kedua pemimpin wanita ini juga berbagi kisah tentang keunikan dan keragaman kuliner khas masing-masing daerah. Uniknya beberapa jenis makanan yang

dikisahkan Ibu Pj Wali Kota Baubau, disebut juga oleh Ibu Gubernur NTB ada di wilayah mereka, tentu dengan nama yang berbeda.

Suasana perbincangan yang begitu hangat juga termasuk membicarakan peluang kerjasama pengembangan IKM antara Kota Baubau dan NTB ke depan. Ibu Gubernur menyatakan kesanggupannya untuk menjembatani kerjasama dimaksud dan bahkan sempat menanyakan rute penerbangan untuk mencapai Kota Baubau. Pertemuan diakhiri dengan saling menukar cinderamata. (*)

Pj Wali Kota Baubau Dr Rasman Lakukan Monev Dana Kelurahan



Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap kegiatan pembangunan sarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan se Kota Baubau tahun 2023 di aula Palagimata Senin sore (11/12/2023).

Menurut Dr Muh Rasman, dasar hukum pelaksanaan dana kelurahan semuanya sudah memahami, yakni ada di Peraturan Wali Kota dan yang perlu penegasan terkait selanjutnya, arah pembiayaan kelurahan. Pihaknya berkeyakinan pula bahwa ini akan dipahami, dibaca dan dilakukan dilaporkan juga bahwa yang pertama kegiatan pembangunan sarana prasarana membiayai pelayanan sosial dasar langsung dan ini di bedakan langsung dan tidak langsung.

"Kalau melaksanakan

kegiatan harus tahu outputnya itu apa misalnya melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kualitas masyarakat supaya meningkat ekonominya setelah melaksanakan pelatihan terus meningkat ekonomi orang yang telah dilatih dengan diterimanya sertifikat. Manfaatnya dia bisa melaksanakan kegiatan ekonomi misalnya. Kenapa saya perlu tegaskan ini karena ini pelaksanaannya satu tahun anggaran jadi sekali lagi tolong ini menjadi hal yang di perhatikan jadi orang yang mengeluarkan statemen yang nyambungnya terlalu jauh, masyarakat kita itu kalau kita bicara manfaat langsungnya itu, 2 tahap saja output habis itu outcome,"ujarnya.

Ditambahkan, intervensi itu adalah penegasan semua kegiatan harus ada ukurannya harus terukur. Oleh sebab itu, perlu ditegaskan karena hasil monitoring evaluasi yang akan di laporkan di-

upayakan untuk membaca intervensi dana kelurahan yang sudah ada penegasan sejak awal kalau ada beberapa dan cukup penting tentang kemiskinan ekstrim, perpu dalam negeri, dan penata potensi yang menjadi tugas dan jangan dianggap hal yang baru.

Dr Muh Rasman mengingatkan kepada Camat dan Lurah tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat agar selalu hati-hati dalam menggunakan kalimat pemberdayaan yang kadang-kadang menyebutnya selalu disalah artikan."Apalagi, camat dan lurah itu lambangnya itu garuda lambang kepala sampai kaki, termasuk isi dadanya. Jadi hati-hati mengeluarkan statement karena kita memegang amanah wilayah, wilayah itu mulai dari atas bawah depan belakang itu di bawah pengelolaan kita. Jadi hati-hati dalam mengeluarkan statement,"tegasnya. (*)

Pj Wali Kota Baubau Dr Rasman: Baubau Harus Rebut Hak Konektivitas di Indonesia



Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat memberikan sambutan di rapat kegiatan RPJPD Di Hotel Zenith Senin (11/12/2023) mengatakan, Kota Baubau harus bisa menempatkan dirinya sebagai bagian dalam hal konektivitas di Indonesia. Dan Uji cobanya ada RPJM 5 tahun. "Kalau Baubau bisa memerankan konektivitasnya di wilayah Sulawesi Tenggara kepulauan maka dia akan menjadi cikal bakal dalam hal memperkuat Indonesia dalam konektivitas di wilayah Indonesia timur,"katanya.

Menurutnya perencanaan 20 tahun Indonesia emas 2045 yang teknoratiknya sudah di bahas di Bappenas, kebetulan 2 tahun lalu draft RPJP itu ada sedikit perbedaan pandangan atau komparasi pemikiran atas apa yang disusun ke tim Indonesia emas saat itu yang dipimpin oleh Menteri Bappenas karena dalam 10 tahun terakhir juga sudah bersepakat dan banyak regulasi yang mengatur tentang mainstreaming pembangunan kelautan.

Dalam konteks lebih luas disebut sebagai pembangunan kemaritiman dengan harapan apa yang dirumuskan dalam dokumen tidak hanya ternarasi secara bagus dan normatif tetapi dia memiliki nilai dan memiliki roh dari setiap ruang yang ada di wilayah Kota Baubau. Karena itu, perencanaan 20 tahun Indonesia emas 2045 tidak menekankan pada kekuatan daratan. Tapi ingin mewujudkan atau mengembalikan kekuatan Indonesia yang potensinya ada di wilayah perairan.

Di wilayah perairan ini 0 sampai ke batas zona eksklusif itu baru 20 sampai 30% dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan ekonomi Indonesia, dari saat yang sepersekian persen dari yang dimiliki saat ini dan itu ada 70% di pulau Jawa, dan pulau Jawa tidak akan mampu menampung ekonomi bangsa untuk 2045. Dan kalau keluar dari wilayah itu maka akan dihadapkan dengan wilayah perairan yang disebut sebagai pembangunan kemaritiman.

"Saat itu kami mendesak, 2045 pembangunan kemaritiman sebagai pembangunan mainstreaming. Kenapa? Karena sektor maritim itu tidak hanya dimaknai perdagangan laut atau transportasi laut". Definisi maritim memang hanya berbicara soal transportasi dan perdagangan laut. Kalau kita berbicara kemaritiman maka semua yang menyangkut maritim itu harus kita bangkitkan ekonominya. Apa itu ekonomi maritim? Di dalam pembahasan dalam rakor kemaritiman oleh bapak Jokowi, sektor kemaritiman itu ada 11. Salah satu-

nya adalah sektor kelautan dan perikanan. Lainnya adalah sumber daya pulau-pulau kecil, ada sumber daya energi mineral, wilayah pemanfaatan jasa kelautan bahkan jasa dan ekosistem laut. Nilai PDB maritim itu juga menjadi indikator 5 tahun ini. Kalau kita buka dokumen RPJMN, indeks pembangunan maritim itu sebagai indikator sendiri hampir sejajar dengan indeks pembangunan manusia. Kalau kita bicara membangkitkan ekonomi kita bicara PDB maritim kita bicara ekonomi maritim. Sehingga mainstreamnya pembangunan kemaritiman merupakan kebutuhan kita,"katanya.

Ditambahkan, tantangan global. Geostrategis wilayah saat di dunia ini sudah menempatkan asia pasifik akan menjadi wilayah yang akan menjadi pertarungan ekonomi negara-negara besar. 70% kekuatan ekonomi yang bertarung saat ini mengarah kepada asia pasifik. Asia pasifik itu, itu penggerak utamanya ada di sumber daya laut. Tidak ada kota bicara asia pasifik dengan mengandalkan sumber daya daratan. Sumber daya asia pasifik itu ada di perairan Indone-

sia. Artinya bahwa geostrategis wilayah Indonesia kalau mau dibangun harus menggerakkan ekonomi kemaritiman yang berbasis sumber daya laut. Sumber daya laut itu bukan cuma ikan, ada mineral di dalam, ada energi di dalam bahkan hari ini kalau bicara jasa kelautan, konektivitas dunia itu hanya ada dua pertama perdagangan laut dan konektivitas digital. Itu yang akan menghubungkan semua wilayah di dunia. Lebih lanjut dijelaskan, konektivitas digital saat ini harusnya mengarah ke Asia Pasifik.

"Saya sebutkan saja, kita punya kabel laut di Indonesia itu ada 70.000 km milik Telkom. Saat ini sektor ekonomi yang akan dipertarungkan di asia pasifik. Komunikasi data, komunitas layanan bahkan kita sekarang di pemerintahan ada SPBE. Basenya adalah konektivitas digital. Transformasi yang terjadi saat ini mengarah kesana semua olehnya itu ruang laut akan menjadi hal yang paling menentukan. "Sekali lagi, wilayah Indonesia akan bisa dibangkitkan ekonominya kalau dia terkoneksi. Kemampuan kita dalam hal menggerakkan ekonomi kemaritiman tadi untuk mengkoneksikan itu hanya akan melalui laut tidak ada melalui daratan,"jelasnya. (*)